

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Hehanussa, 2015).

Menurut Subawe, 2008 mendefinisikan bahwa :

Teori keagenaan (*agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari segi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang member wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan piha yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam benuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Menurut Belkaouli, 2001 mndefinisikan bahwa:

Teori kaagnan (*agency theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telh diberikan oleh agen. Keberadaan perbedan kepentingan atara agen dan priipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko.

Teori kegenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat dijeaskan dari dua prospektif yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan rakyat. Dampak dari hubungan tersebut dapat berupa hal positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu alam betuk efisiensi, sedangkan ampak negatifnya beupa prilaku *opportunistic* Bandariy (2012). Hal ini tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan dari pada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak boleh jadi

memanfaatkan kepentingan pribadi karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul etk eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan mnyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memrhatkan bahwa kinerja mereka selama ini baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporn keuangan yang engkap dan wajar, etapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para penggnaan laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan penggunaan laporan keuangan terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemeritah daerah akan berusaha untuk mewujudkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengeolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan pnelitian ini dapat dilihat dari hubungan atau kontrak antara agen dan prinsipel dimana agen memiliki kunggulan kaena memiliki lebih banyak informasi ketimbang prinsipal karena agen merupakan pemangku kekuasaan. Salah satu informasi yng dimiliki oleh agen adalah berupa lapoan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak agen yang memiliki tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan serta mempublikasikannya untuk memudahkan akses bagi masyarakat sebagai pihak prinsipal memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawab dari pemerintah untuk masyaraakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintah) yang harus menetapkan strategis tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaikuntuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasillaporan keuangan yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal merupakan pengembangan dari teori keagenan dimana teori ini berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan penerima informasi yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut. Dasar teori signal adalah ketidak seimbangan perolehan informasi yang menjadi alasan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan. Ketidak seimbangan informasi dapat terjadi diantara dua kondisi ekstern yaitu perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen (Sartono, 2002).

Menurut Tjandrakirana dan Meva (2014) menyatakan bahwa:

Teori sinyal adalah menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak penggunaan laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi mengenai perusahaan.

Menurut Wijaya (2013) menyatakan bahwa:

Teori sinyal juga dapat membantu pihak perusahaan (*agemnt*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya kaitan antara teori sinyal dengan penelitian ini yaitu dalam teori sinyal dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam disini dimaksudkan untuk pemerintah itu sendiri sedangkan pihak luar adalah pengguna informasi keuangan daerah yaitu masyarakat. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menjadai sinyal bagi pihak luar, tyerutama bagi pihak yang berkepentingan adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan.

Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh penggunaan laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Sehingga pihak pengguna informasi keuangan dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Nordiawan (2008) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Bastian (2010) akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Wahida, 2015) Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kewajiban pemerintah kepada publik untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi.

2.2.2 Jenis Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Rosjidi (2001), akuntabilitas dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintahan Negara termasuk juga pemerintahan yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya. Dari jenis akuntabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban yang dilakukan otoritas rendah kepada otoritas yang lebih tinggi atas pengelolaan sumber dana. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas. Akuntabilitas internal adalah

pertanggungjawaban secara langsung bawahan kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja aktivitasnya. Akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban seluruh amanat untuk dikomunikasikan kepada pihak luar.

2.2.3 Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas Kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas Proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

- 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa dimensi akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas kejujuran terkait penghindaran penyalahgunaan jabatan yang menjamin adanya praktik organisasi sektor publik yang sehat dan akuntabilitas hukum terkait kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang terkait dengan penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas telah tercukupi, dapat dilihat melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Akuntabilitas program (*program accountability*) terkait pertimbangan tujuan yang ditetapkan beserta pertimbangan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal untuk lembaga publik. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) terkait pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi kedepannya. Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja terkait dengan pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik dalam pemakaian dana publik secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada kebocoran dana dan pemborosan dan juga korupsi.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Pemdagri No 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk

maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Kualitas pelaporan Keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Sukhemi, 2011).

Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. OPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap OPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Organisasi perangkat daerah (OPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. OPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap OPD harus membuat laporan keuangan unit kerja.

Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penggunaan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP No. 71/2010.

Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina, dkk. 2015:19)

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam pemerintahan daerah. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP No. 71/2010 Paragraf 24 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi

fiskal dan akuntabilitas. Menurut Nordiawan (2008), laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Bastian, 2006).

2.4.1 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Menurut (Nordiawan, 2010), tujuan penyajian laporan keuangan terdiri dari menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, dan menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Menurut Mardiasmo (2009) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

- 1) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk monitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi.

3) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and autharization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi pengguna dana.

4) Kelangsungan oerorganisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang atau jasa.

5) Hubungan masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan dan masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah

ditetapkan. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.

Untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. Untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat serta berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi sektor publik secara lebih mendalam.

2.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Nordiawan (2010) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut:

1) Relevan

Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (*predictive value*) dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka (*feedback value*). Selain itu, suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

2) Andal

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan yaitu Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Terkait hal itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu relevan, laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dan informasi disajikan tepat waktu dan lengkap. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.4.3 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013, komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut yaitu Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Di samping

itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a) Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

4) Laporan Operasional

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos yaitu, Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Pos luar biasa, Surplus/defisit-LO.

5) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya mempunyai pos-pos yaitu: Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

7) Neraca

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2.5 Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat

disimpulkan pengertian aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah menyatakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*) (Mardiasmo, 2002; Miftahul, 2017)

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Menurut (Sande, 2013) yang sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pemerintah daerah harus memenuhi beberapa hal yaitu: 1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa 2) Kemudahan, yaitu

pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah 3) *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Aksesibilitas dalam organisasi sektor publik dapat ditingkatkan dengan dibuatnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk: (a) mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, (b) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Kesimpulannya Pemerintah Pusat telah membuat peraturan untuk mendukung keterbukaan informasi publik baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan penyediaan informasi secara terbuka kepada publikn maka penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

2.5.2 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan

Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas Laporan keuangan (Wahida, 2015), yaitu:

1) Terbuka di media massa

Laporan Keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa sehingga pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal dapat melihat secara langsung dari media cetak.

2) Mudah diakses

Pihak eksternal dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui internet (*website*).

3) Ketersediaan informasi

Informasi laporan keuangan yang dipublikasi secara lengkap disampaikan terhadap pengguna laporan keuangan yang membutuhkan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan pengaruh kualitas, penyajian, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang uraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti Terdahulu | Judul | Variabel | Hasil |
|----|--|---|---|--|
| 1 | Fikrian Hafzan (Jurnal, Universitas Riau, 2017) | Pengaruh kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | X1 = Kualitas laporan keuangan X2= penyajian laporan keuangan X3 = Aksesibilitas laporan keuangan Y = Akuntablitas pengelolaan keuangan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • X1 terhadap Y yaitu berpengaruh • X2 terhadap Y yaitu berpengaruh • X3 terhadap Y yaitu berpengaruh |
| 2 | Sari Embun Widya (Jurnal, Universitas Riau, 2017) | Pengaruh sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan Akuntabilitas | X1= sistem pengendalian intern X2= penyajian laporan keuangan X3= aksesibilitas laporan keuangan X4= gaya kepemimpinan Y= Akuntabilitas pengelolaan | <ul style="list-style-type: none"> • X1 terhadap Y yaitu berpengaruh • X2 terhadap Y yaitu tidak berpengaruh • X3 terhadap Y yaitu berpengaruh • X4 terhadap Y yaitu tidak |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | pengelolaan keuangan Daerah di kabupaten indragiri hulu | keuangan | berpengaruh |
| 3 | Superdi (Jurnal, Universitas Riau, 2017) | Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah | X1= Pengaruh penyajian laporan keuangan X2= aksesibilitas X3= sistem akuntansi keuangan daerah Y= akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • X1 terhadap Y yaitu berpengaruh • X2 terhadap Y yaitu berpengaruh • X3 terhadap Y yaitu berpengaruh |
| 4 | Hehanussa Salomi J (Jurnal, Universitas Kristen Indonesia Maluku, 2015) | Pengaruh penyajian laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan Keuangan daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah Kota ambon | X1= penyajian laporan Keuangan daerah X2= Aksesibilitas laporan Keuangan daerah Y= Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • X1 terhadap Y yaitu berpengaruh positif dan signifikan • X2 terhadap Y yaitu berpengaruh positif dan signifikan |
| 5 | Poae Dedy Aries (Jurnal, Universitas | Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan | X1= Penyajian Laporan Keuangan Daerah X2= | <ul style="list-style-type: none"> • X1 terhadap Y yaitu berpengaruh positif |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | Negeri Padang, 2013) | Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud | Aksesibilitasnya Y= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • X2 terhadap Y yaitu tidak berpengaruh dan tidak signifikan |
| 6 | Mustofah Anies Iqbal (Jurnal, Universitas Negeri Semarang, 2012) | Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan Terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten Pemalang | X1= Pengaruh penyajian X2= aksesibilitas laporan keuangan Y = akuntabilitas pengelolaan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • X1 terhadap Y yaitu berpengaruh positif • X2 terhadap Y yaitu berpengaruh positif |

Sumber: data yang diolah,2019

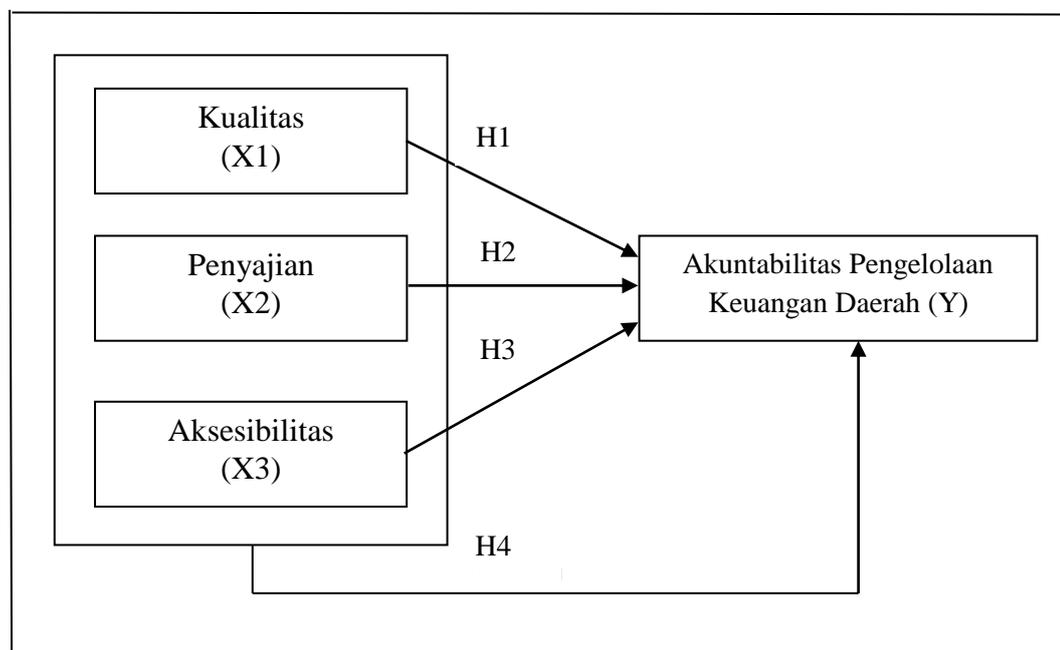
Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas akan tetapi pada penelitian ini penatausahaan sebagai variabel dependen yang terdiri dari kualitas, penyajian dan aksesibilitas berdasarkan Permendagri No 64 tahun 2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dengan Operator Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang yang menjadi objek pada penelitian ini.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:

Jika kualitas laporan keuangan pemerintah terutama pada Organisasi Perangkat Daerah bagus maka akan dapat dipertanggungjawabkan maka terciplah

akuntabilitas yang bagus. Penyajian laporan keuangan daerah, pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan. Agar akuntabilitas suatu laporan keuangan yang baik maka pemerintah memberikan kemudahan berupa fasilitas informasi yang dapat diperoleh dengan mudah.



Sumber : Data yang diolah, 2019

Gambar 2.1

Skema Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Kualitas, penyajian, dan aksesibilitas secara parsial maupun stimultan mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah di Operator Perangkat Daerah (OPD) pada Kota Palembang.

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ :Kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah
- H₂ :Penyajian Laporan Keuangan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah
- H₃ :Aksesibilitas laporan keuangan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- H₄ :Kualitas, penyajian, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan mempunyai pengaruh secara silmutan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.